

**ANALISIS WACANA KRITIS: IDEOLOGI HIZBUT TAHRIR INDONESIA
DALAM WACANA KENAIKAN HARGA BBM 2013
DI BULETIN *AL-ISLAM* YANG BERJUDUL "MENAIKKAN HARGA
BBM: MENAIKKAN ANGKA KEMISKINAN"**

**(A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS: HIZBUT TAHRIR INDONESIA'S
IDEOLOGY IN THE DISCOURSE OF THE 2013 RAISING OF FUEL PRICE ON
BULETIN *AL-ISLAM* "RAISING THE FUEL PRICE: RAISING THE NUMBER OF
POVERTY)**

Yusep Ahmadi F.

STKIP Siliwangi, Cimahi
Jalan Terusan Jenderal Sudirman, Cimahi 40526
Telepon: 081320668124, pos-el: yusep_ahmadif@yahoo.co.id

Nani Darmayanti

Universitas Padjadjaran
Jalan Raya Jatinangor Km 21 Jatinangor 45363
Telepon: 082130179000, pos-el: n.darmayanti@unpad.ac.id

Wahya

Universitas Padjadjaran
Jalan Raya Jatinangor Km 21 Jatinangor 45363
Telepon: 085295495573, pos-el: rizka.cikal@yahoo.com

Tanggal naskah masuk: 9 Mei 2014
Tanggal revisi terakhir: 3 November 2014

Abstract

*THIS paper analyzes the relationship between language and social practice realized by the form of the spread of Hizbut Tahrir Indonesia's (HTI) ideology in discourse of the 2013 fuel-price raise in **Al-Islam** bulletin. The method used in this study is descriptive qualitative of Fairclough's (1992, 1995, 2003) model for Critical Discourse Analysis (CDA). The study aims to reveal HTI's ideology in **Al-Islam** bulletin in relation to the discourse of the 2013 fuel-price raise. The result shows that HTI constructs a social exercise by spreading Islamic ideology in discourse of the 2013 fuel-price raise in the bulletin. The ideology is spread by (a) representing Indonesian government as the guilty party for impoverishing the people by implementing a policy of raising the fuel price, and (b) proposing the implementation of Islamic ideology as a solution in managing oil and gas. Such social exercise is constructed by utilizing linguistic features, namely text structure, transitivity, modality, conjunction, and pronouns. Such proposition of Islamic ideology by HTI is within the socio-cultural context of an Islamic organization which struggles for the Islamic ideology or sharia to be the sociopolitical system in Indonesia.*

Key words: *language and ideology, Hizbut Tahrir Indonesia, Islamic ideology, discourse of the 2013 fuel-price hike, Fairclough's model for CDA*

Abstrak

TULISAN ini menganalisis hubungan bahasa dengan praktik sosial yang berbentuk pelancaran ideologi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) 2013 di buletin *Al-Islam*. Metode yang digunakan dalam penelitian

ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis (AWK) model Fairclough (1992, 1995, 2003). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ideologi HTI di buletin *Al-Islam* berkaitan dengan wacana kenaikan harga BBM 2013. Hasil analisis menunjukkan bahwa HTI telah melakukan praktik sosial berupa pelancaran ideologi Islam dalam wacana kenaikan harga BBM 2013 di buletin *Al-Islam*. Pelancaran ideologi tersebut dilakukan melalui (a) perepresentasian Pemerintah Republik Indonesia sebagai pihak yang membuat masyarakat semakin sulit dan sengsara karena rencana kebijakannya menaikkan harga BBM 2013, (b) pelancaran ideologi Islam sebagai ideologi solutif dalam pengelolaan minyak dan gas. Praktik sosial tersebut disusun melalui pemanfaatan fitur-fitur linguistik, seperti struktur teks, ketransitifan, modalitas, kata hubung, dan kata ganti. Pelancaran ideologi Islam yang dilakukan HTI tersebut tidak terlepas dari konteks sosial-budaya yang melingkupinya, yaitu HTI sebagai organisasi Islam yang memperjuangkan ideologi Islam atau hukum syariah untuk dijadikan sistem sosial-politik di Indonesia.

Kata kunci: bahasa dan ideologi, Hizbut Tahrir Indonesia, ideologi Islam, wacana kenaikan harga BBM 2013, AWK model Fairclough

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) di tahun 2013 menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Mulai dari kalangan mahasiswa, ahli ekonomi, politikus hingga ormas (organisasi masyarakat) saling menyampaikan pendapatnya. Berbagai kelompok baik yang pro kenaikan harga BBM maupun yang kontra kenaikan harga BBM saling “beradu” argumen dalam berbagai wacana, baik dalam bentuk forum diskusi, pemberitaan media, opini-buletin, maupun tindakan-tindakan unjuk rasa. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai ormas Islam yang memiliki basis yang cukup kuat di Indonesia juga tidak ketinggalan untuk menyampaikan pendapatnya. HTI sering melakukan unjuk rasa dalam menyampaikan sikapnya berkaitan dengan wacana kenaikan harga BBM. Selain dengan unjuk rasa, HTI juga menyampaikan pendapat dan argumennya melalui buletin *Al-Islam* yang disebarkan kepada masyarakat.

Berbagai bentuk wacana pro dan kontra tersebut tidak terlepas dari penggunaan bahasa. Melalui bahasa, berbagai pendapat tersebut dibangun dan disampaikan kepada masyarakat. Sejalan dengan itu, Fairclough (1992, 67:87–89) mengemukakan bahwa pemakaian bahasa merupakan praktik sosial dan praktik kekuasaan. Berbagai wacana membawa ideologi tertentu.

Senada dengan itu, Foucault mengemukakan bahwa wacana berperan dalam mengontrol, menormalkan, dan mendisiplinkan individu. Sementara itu, dalam pandangan Althusser, wacana berperan dalam mendefinisikan individu dan memosisikan seseorang dalam posisi tertentu (dalam Eriyanto, 2009:19). Oleh karena itu, untuk melihat bagaimana pemakai bahasa membawa nilai ideologi tertentu, diperlukan analisis yang menyeluruh, baik dari aspek bahasa itu sendiri, maupun dari aspek sosialnya mengingat bahasa secara sosial dan historis adalah bentuk tindakan dalam hubungan dialektikal dengan struktur sosial (Fairclough, 1995:57–68).

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini akan menyelidik ideologi yang terkandung dalam wacana kenaikan harga BBM 2013 di buletin *Al-Islam* Hizbut Tahrir Indonesia. Adapun wacana yang menjadi objek kajian ini berjudul “Menaikkan Harga BBM: Menaikkan Angka Kemiskinan” (MHBMAK) di buletin *Al-Islam* Edisi 662, 21 Juni 2013 M-12 Sya’ban 1434 H.

1.2 Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a) Bagaimana representasi Pemerintah RI dan rencana kebijakannya menaikkan harga BBM 2013 pada teks MHBMAK di buletin *Al-Islam*?

- b) Apa ideologi HTI dalam wacana kenaikan harga BBM 2013 pada teks MHBMAK di buletin *Al-Islam*?

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui representasi Pemerintah RI dan untuk mengetahui ideologi HTI yang terkandung dalam teks MHBMAK di buletin *Al-Islam* HTI.

1.4 Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor (1975) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diperingati (dalam Sudarto 1997:62). Secara terperinci metode deskriptif adalah metode yang berusaha memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai data, sifat-sifat serta hubungan fenomena-fenomena yang diteliti (Djajasudarma, 1993:9). Analisis kualitatif-deskriptif dalam penelitian ini akan disesuaikan dengan kerangka teori analisis wacana kritis model Fairclough (1992, 1995, 2003).

2. Kerangka Teori

2.1 Analisis Wacana Kritis Model Fairclough

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis model Fairclough. Beberapa pokok pemikiran Fairclough menempatkan wacana atau penggunaan bahasa sebagai praktik sosial; wacana atau penggunaan bahasa dihasilkan dalam sebuah peristiwa diskursif tertentu; wacana yang dihasilkan berbentuk sebuah genre tertentu (dalam Titscher *et al.*, 2009:241–144). AWK model Fairclough dikenal dengan sebutan analisis wacana tiga dimensi. Analisis tiga dimensi ini ialah analisis yang mengintegrasikan tiga level analisis: 1) analisis tekstual (level mikro) adalah analisis deskriptif terhadap dimensi teks; 2) analisis

praktik wacana (level meso) adalah analisis interpretatif terhadap pemroduksian, penyebaran, dan pengonsumsi wacana, termasuk intertekstualitas dan interdiskursivitas; 3) analisis sosiokultural (level makro) adalah analisis eksplanatif terhadap konteks sosiokultural yang melatarbelakangi kemunculan sebuah wacana (Fairclough, 1995:57–62).

Inti pendekatan Fairclough menyatakan bahwa wacana merupakan bentuk penting praktik sosial yang mereproduksi dan mengubah pengetahuan, identitas dan hubungan sosial yang mencakup hubungan kekuasaan dan sekaligus dibentuk oleh struktur dan praktik sosial yang lain. Oleh karena itu, wacana memiliki hubungan dialektik dengan dimensi-dimensi sosial yang lain (dalam Jorgensen dan Philips, 2007:122–123). Lebih lanjut wacana adalah praktik yang bukan sekadar menunjukkan dunia, tetapi juga menandakan dunia, membentuk, dan membina dunia dalam makna (Fairclough, 1992:63–64).

2.2 Ideologi

Ideologi adalah hal yang banyak diperbincangkan di berbagai wacana sosiobudaya. Di abad 20 sampai dengan awal abad 21 sekarang ideologi telah banyak didefinisikan dan dikaitkan dengan berbagai hal, seperti sistem politik, agama, dan sistem sosial secara luas. Althusser (1971 dalam Jorgensen dan Philips, 2007:28–29) mendefinisikan bahwa ideologi sebagai sistem representasi yang menyamakan hubungan-hubungan kita yang sesungguhnya satu sama lain dalam masyarakat dengan cara membangun hubungan-hubungan imajiner antara orang-orang dan antara mereka sendiri dan formasi sosial. Pelancaran ideologi bisa melalui interpelasi, yaitu proses bahasa yang menggambarkan dan membangun posisi sosial individu dalam sebuah tatanan sosial tertentu (*ibid*). Sementara itu, Fairclough (dalam Jorgensen dan Philips, 2007:139) mengatakan bahwa ideologi sebagai konstruksi makna yang memberikan kontribusi bagi pemroduksian, pereproduksian, dan transformasi hubungan-hubungan dominasi. Artinya, sebuah wacana

mengandung ideologi yang mengatur, menghubungkan, dan memosisikan hal-hal tertentu dalam tatanan sosial tertentu. Hal itu sesuai dengan apa yang dikemukakan Ratna (2010:448) bahwa pada dasarnya ideologi adalah kumpulan dari berbagai kepercayaan, prinsip tertentu untuk mengatur masyarakat.

2.3 Islam sebagai Ideologi

Secara teologi Islam adalah kepercayaan atau agama yang dibangun oleh prinsip keesaan Tuhan. Allah yang disembah sebagai Tuhan adalah penggerak pertama dan Maha Pencipta atas segala alam semesta (Ali, 2007:212). Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. ini berlandaskan pada Alquran dan hadis yang di dalamnya terdapat segenap aturan tentang peribadatan (langsung) kepada Tuhan (ubudiyah) dan peribadatan antarmakhluk yang mengatur tatanan kehidupan sosial (muamalah). Segenap aturan tersebut disebut syariah.

Sementara itu, menurut Merad, Islam mengalami proses ideologisasi, yakni proses yang menyebabkan pergeseran desisif dari lapangan teologikal tradisional pada lapangan sosiologis dan memformulasikan terma “Islam” ke dalam norma-norma dan nilai-nilai tatanan sosiopolitik (dalam Al-Chaidar, 1999:5). Jadi, yang dimaksud dengan ideologi Islam adalah ideologi yang berusaha mengatur dan membangun masyarakat (tatanan sosial) dalam kerangka teologi Islam dan syariah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Analisis Tekstual (Analisis Mikro)

Analisis tekstual adalah analisis tahap pertama dalam AWK model Fairclough. Dimensi tekstual atau dimensi mikro ini dianalisis dengan beberapa pemerincian. Menurut Fairclough (1992: 75–78, 234–237), ada empat bentuk atau sifat teks yang dapat dianalisis, yaitu struktur teks, koherensi teks, tata bahasa, dan leksikal. Dalam penelitian ini analisis tekstual hanya terdiri atas struktur teks, tata bahasa yang meliputi ketransitifan dan modalitas, serta leksikal yang berupa kata kunci. Namun, dalam penelitian ini

hanya akan dibahas struktur teks, ketransitifan, dan modalitas.

A. Struktur Teks

Struktur generik teks adalah *the overall structure or organisation of a text*. Analisis struktur generik berkenaan dengan nilai strategi genre yang bersifat tujuan-terpadu (*purpose-driven*) (Fairclough, 2003:72). Secara umum teks MHBMAK dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup.

Bagian Pembuka

Bagian pembuka terdiri atas paragraf pertama sampai dengan paragraf enam. Dalam bagian ini terdapat beberapa kalimat yang menerangkan hal-hal berikut: 1) landasan hukum dari rencana akan dinaikkannya harga BBM di tahun 2013; 2) rencana pemerintah mengadakan program BLSM sebagai kompensasi naiknya harga BBM; 3) perhitungan BLSM dari sudut pandang nonpemerintah; 4) dampak kenaikan BBM terhadap tarif angkutan umum dan kebutuhan pokok; 5) pandangan HTI terhadap hal-hal di atas.

Bagian Isi

Bagian ini terdiri atas paragraf tujuh sampai dengan paragraf empat belas. Dalam bagian ini dijelaskan beberapa hal berikut: 1) dampak kenaikan harga BBM terhadap jumlah orang miskin; 2) efektivitas program BLSM terhadap angka kemiskinan; 3) dampak kenaikan BBM terhadap daya beli masyarakat; 4) latar belakang pemerintah menaikkan harga BBM; 5) pandangan HTI terhadap hal-hal di atas.

Bagian Penutup

Bagian ini terdiri atas paragraf lima belas sampai dengan delapan belas. Dalam bagian penutup ini terdapat beberapa hal berikut: 1) pandangan HTI terhadap rencana kenaikan harga BBM dan pengelolaan migas di Indonesia; 2) penerapan hukum syariah sebagai solusi yang ditawarkan HTI terhadap polemik kenaikan harga BBM dan migas di Indonesia.

Selanjutnya, keseluruhan teks MHBMAK tersebut terdiri atas beberapa subteks yang

ditandai dengan subjudul tertentu. Dalam teks MHBMAK ditemukan empat subjudul yang di dalamnya terdiri atas tiga sampai empat paragraf. Secara struktur, teks MHBMAK tersebut dibangun oleh empat subteks atau subwacana yang ditandai oleh empat subjudul. Subjudul-subjudul tersebut adalah 1) *Rakyat Miskin Aman dari Dampak Kenaikan Harga BBM?*; 2) *Menaikkan Harga BBM = Menambah Jumlah Orang Miskin*; 3) *Demi Asing*; 4) *Wahai Kaum Muslimin*. Setiap subteks tersebut selalu diakhiri oleh paragraf simpulan. Setiap paragraf simpulan tersebut merupakan simpulan atau penilaian redaksi *Al Islam*-HTI atas apa yang dijelaskan sebelumnya.

Tiga subjudul (subteks) yang pertama merepresentasikan (kebijakan) Pemerintah RI berkaitan dengan rencana kenaikan harga BBM dan satu subteks terakhir berisi pelancaran ideologi HTI, yakni ideologi Islam atau hukum syariah dalam pengelolaan minyak dan gas. Jadi, secara struktur teks MHBMAK tersebut dibangun dengan terstruktur atau tertata yang di dalamnya bermuatan makna dan representasi peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan wacana kenaikan harga BBM 2013.

B. Tata Bahasa

Dalam bagian tata bahasa menurut Fairclough (1992: 235), ada tiga aspek yang bisa dianalisis, yakni ketransitifan, tema, dan modalitas. Ketransitifan berkenaan dengan fungsi ideasional bahasa, tema berkenaan dengan fungsi tekstual bahasa, dan modalitas berkenaan dengan fungsi interpersonal bahasa (lihat Titscher, 2009 dan Eriyanto, 2009). Dalam analisis ini hanya akan dideskripsikan aspek ketransitifan dan modalitas.

Analisis Ketransitifan dan Modalitas yang Merepresentasikan (Kebijakan) Pemerintah RI

a) Ketransitifan

Dalam ketransitifan bisa dilihat seperti apa jenis proses dan pemeran yang menonjol di dalam teks, apakah suara utama (aktif atau pasif), dan sejauh mana signifikasinya dalam proses

nominalisasi. Perhatian utama ialah agen atau pelaku, ekspresi sebab dan akibat penanggung-jawaban (Fairclough, 1992:235–236). Sementara itu, Jorgensen dan Philips (2007:152) menyatakan bahwa berdasarkan dimensi tekstual kerangka Fairclough, ketika menganalisis bentuk transitif, fokusnya adalah bagaimana peristiwa-peristiwa dan proses-proses dihubungkan (atau tidak dihubungkan) dengan subjek dan objek. Ketertarikannya berada dalam penginvestigasian konsekuensi-konsekuensi ideologis yang dimiliki dalam bentuk yang berbeda.

Berikut adalah analisis ketransitifan terhadap wacana “Menaikkan Harga BBM: Menaikkan Angka Kemiskinan”.

1. ... “kenaikan harga BBM sudah pasti *berdampak* terhadap tarif angkutan umum. (4.1)
2. Ketika harga BBM naik, *dipastikan* harga akan naik lagi.... (5.5)
3. Jadi jelas, “program perlindungan” yang *disiapkan tidak cukup melindungi* rakyat.... (6.1)
4. *Menaikkan* harga BBM = *Menambah* Jumlah Orang Miskin. (7.1)
5. ... angka *kemiskinan* sebesar 1,6 persen atas *dampak kenaikan* harga BBM....(7.3)
6. Belajar dari fakta tahun 2006 (setahun setelah kenaikan harga BBM) jumlah orang miskin *melonjak* menjadi....(9.1)
7. ...*menyebabkan* daya beli buruh akan *menurun*.... (10.4)
8. ...mereka ini rentan terkena dampak *kenaikan* harga BBM dan *merosot* tingkat *kesejahteraannya*. (10.7)
9. ...*kenaikan* harga BBM akan *menggerus* daya beli 90% rakyat Indonesia.(10.8)
10. ...*penghapusan subsidi* termasuk subsidi BBM adalah *amanat* (pemerintah) dari IMF, Bank Dunia, USAID, dan ADB. (13.1)
11. OECD *meyakinkan* pemerintah Indonesia agar segera *menghapus* subsidi BBM....(13.5)
12. ...*kenaikan* harga bbm ini meski *merugikan* dan *menyengsarakan* rakyat banyak tetap dilakukan. (15.1)

Bentuk ketransitifan dalam wacana MHBMAK sebagian besar menjelaskan hubungan peristiwa kenaikan harga BBM dengan dampaknya yang akan muncul. Semua hubungan tersebut kausatif dan semua dampak dari kenaikan harga BBM bersifat negatif. Bentuk-bentuk transitif pada data nomor (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), dan (12) menjelaskan dan menghubungkan peristiwa kenaikan harga BBM dengan dampak negatif yang akan timbul, seperti tarif angkutan umum akan naik, harga kebutuhan pokok akan naik, bertambahnya angka kemiskinan, tergerusnya daya beli buruh (masyarakat) yang semuanya itu akan menyengsarakan masyarakat. Dengan demikian, bentuk-bentuk transitif tersebut merepresentasikan bahwa (kebijakan) Pemerintah RI yang akan menaikkan harga BBM itu adalah kebijakan yang akan menyengsarakan rakyat. Di sini teks MHBMAK di buletin *Al-Islam* memojokkan pemerintah sebab dalam teks MHBMAK tidak disinggung sama sekali dampak positif dari kebijakan kenaikan harga BBM.

Sementara itu, pada data nomor (10), (11), dan (12) terdapat nominalisasi dan ketransitifan yang menjelaskan bahwa peristiwa kenaikan harga BBM yang akan dilaksanakan pemerintah bermula dari kepentingan asing, dalam hal ini IMF, Bank Dunia, USAID, dan ADB, serta OECD yang mengamanatkan pemerintah agar menaikkan harga BBM. Ini memperlihatkan bahwa wacana MHBMAK merepresentasikan pemerintah RI proasing dan tidak memperhatikan rakyat banyak dengan saksama. Dengan demikian, citra pemerintah kembali direpresentasikan dengan citra yang negatif karena mendukung kepentingan asing yang diwakili beberapa organisasi keuangan-ekonomi di atas.

Selain itu, pemanfaatan ketransitifan ini juga memunculkan bentuk-bentuk nominalisasi yang juga bermakna negatif, seperti kemiskinan dan kemerosotan. Dengan demikian, MHBMAK melalui pemanfaatan ketransitifan dan nominalisasi telah merepresentasikan Pemerintah RI sebagai pihak yang akan menyengsarakan rakyat dan mendukung kepentingan asing.

b) Modalitas

Dalam kerangka analisis wacana kritis, Hodge dan Kress (dalam Fairclough, 2003:164) mengatakan bahwa modalitas merepresentasikan pendirian (*stance*) serta ketertarikan atau keterkaitan (*affinity*) pembicara atau penulis kepada seseorang atau sesuatu yang terdapat dalam klausa. Analisis modalitas memusatkan perhatian pada derajat kelekatan penutur dengan afiliasi pada pernyataannya (dalam Jorgensen dan Philips, 2007:153). Jadi, dalam analisis ini bisa dilihat bagaimana derajat kelekatan penutur dengan agen atau peristiwa yang terlibat dalam pernyataannya.

13. Jadi jelas, “program perlindungan” yang disiapkan *tidak cukup* melindungi rakyat....(6.1.2)
14. Dampak keseluruhannya *tetap saja* akan sangat berat dirasakan. (6.2)
15. Yang paling merasakan dampaknya *tetap saja* adalah rakyat kebanyakan. (12.2)

Pada data nomor (13), (14), dan (15) terdapat bentuk modalitas *tidak cukup* dan *tetap saja* yang merupakan sikap HTI di MHBMAK buletin *Al-Islam*. HTI menilai bahwa program BLSM yang akan dilaksanakan pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga BBM tidak akan menjadi solusi yang baik yang bisa menutupi atau menanggulangi dampak negatif dari kenaikan harga BBM. Melalui penggunaan modalitas *tidak cukup* dan *tetap saja*, HTI kembali merepresentasikan pemerintah RI dalam bentuk yang negatif, dalam arti pemerintah tidak mampu memberikan solusi yang memadai atas dampak negatif dari kenaikan harga BBM.

Analisis Ketransitifan dan Modalitas yang Menunjukkan Pelancaran Ideologi HTI

a) Ketransitifan

16. Rasul *menegaskan* “manusia adalah serikat dalam tiga hal: dalam padang rumput, air, dan api” (16.3)
17. Semua itu hanya bisa sempurna *dilaksanakan* melalui *penerapan syariah Islam*...(18.1.1)

18. Allah SWT telah *memperingatkan* “siapa saja yang berpaling dari peringatanKu, maka baginya penghidupan yang sempit” (18.3)

Pada data nomor (16) terdapat penggunaan bentuk transitif *menegaskan* yang menunjukkan HTI melancarkan ideologi Islamnya (syariah). Data nomor (16) juga merupakan bentuk atau cara HTI dalam mengutip hadis Rasul. Lazimnya bila mengutip hadis Rasul bisa dengan kalimat pengantar, seperti *Rasulullah telah bersabda* atau *Rasul bersabda*. Akan tetapi, demi menguatkan kadar makna ideologisnya HTI lebih memilih dengan kata pengantar *Rasul menegaskan*. Dengan bentuk itu, rasa kalimatnya cenderung akan lebih kuat. Kemudian, pada data nomor (17) terdapat bentuk transitif pasif *dilaksanakan* yang membentuk frasa nominal *penerapan syariah Islam*. Hal itu secara eksplisit menunjukkan bahwa HTI telah melancarkan ideologinya, yakni syariah atau ideologi Islam.

Sementara itu, bentuk transitif *memperingatkan* pada data nomor (18) juga merupakan bentuk transitif yang merepresentasikan pelancaran ideologi HTI. Kata *memperingatkan* juga merupakan bentuk personifikasi dari sifat Allah Swt. Bentuk tersebut secara semantik memiliki makna yang terasa lebih kuat dan emosional karena untuk menggambarkan Tuhan berbicara, kita bisa menggunakan kata *berfirman*. Akan tetapi, demi kepentingan ideologis tersebut HTI lebih memilih kata *memperingatkan* daripada *berfirman*.

b) Modalitas

19. *Agar* migas menjadi berkah dan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat, jalan satu-satunya *harus* dikelola sesuai syariah Islam. (16.1)
20. ...migas *harus* dikelola negara mewakili rakyat. (17.1)
21. Migas *tidak boleh* dikonsesikan atau diserahkan kepada swasta apalagi asing. (17.2)
22. Semua itu *hanya bisa* sempurna dilaksanakan melalui penerapan syariah Islam....(18.1.2)

Pada data nomor (19), (20), (21), dan (22) terdapat bentuk modalitas berderajat tinggi, seperti *agar, harus, tidak boleh, hanya bisa*. Di sini terletak pelancaran ideologi yang benar-benar eksplisit. Bentuk-bentuk modalitas tersebut langsung dihubungkan dengan leksikal-leksikal Islam, syariah dan khilafah Islamiyah. Modalitas-modalitas tersebut terletak di bagian akhir teks. Hal itu bisa diartikan bahwa penggunaan modalitas di akhir teks sebagai alat dalam menyusun tesis atau penilaian (simpulan) dari berbagai peristiwa dan proses sosial yang dipaparkan sebelumnya (di bagian pembuka dan bagian tengah teks). Tesis yang dikemukakan *Al-Islam-HTI* pada wacana MHBMAK ini adalah perlunya sistem Islam atau syariah dalam mengelola migas di Indonesia.

C. Koherensi

Koherensi berkaitan dengan kepaduan dan kesalingpautan antarunsur dalam wacana. Berkaitan dengan itu, Djajasudarma (2006:44) mengungkapkan bahwa kohesi adalah keserasian hubungan antara unsur yang satu dan unsur yang lain dalam wacana sehingga terciptalah pengertian yang apik atau koheren. Kohesi merujuk pada perpautan bentuk, sedangkan koherensi pada perpautan makna.

Koherensi yang ditemukan dalam teks MHBMAK ini berbentuk kata hubung dan kata ganti peristiwa. Penggunaan kedua bentuk linguistik tersebut membangun opini negatif tentang rencana kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, yaitu dengan memunculkan berbagai dampak negatif dari kenaikan harga BBM yang dinilai menyengsarakan masyarakat. Buletin *Al-Islam* ini secara tersusun telah membentuk opini negatif terhadap pemerintah RI karena dinilai sebagai pihak yang tidak bisa mengelola energi BBM dengan baik karena rencana kebijakannya yang dinilai kontra dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat.

1) Kata Hubung

Berikut beberapa bentuk kata hubung yang menghubungkan peristiwa kenaikan BBM dengan dampaknya.

23. Jika misalnya, tarif angkot yang berlaku rata-rata 2 ribu, maka akan naik minimal 500 rupiah atau bahkan seribu. *Itu artinya*, (4.6) bantuan BLSM akan habis untuk menutupi kenaikan ongkos naik angkot pergi pulang satu kali. Jika harus dua kali naik angkot, *maka* (4.7) harus nombok.
24. *Di sisi lain*, (5.1.1) harga-harga barang dan (5.1.2) jasa pasti akan naik.
25. *Jadi jelas*, (6.1.1) “program perlindungan” yang disiapkan tidak cukup melindungi....
26. *Boleh jadi*, (9.1) angka kemiskinan nantinya akan lebih tinggi dari perkiraan itu.
27. *Dari semua itu*, (13.1) pada akhirnya dampak kenaikan harga BBM akan menimpa....
28. *Di samping itu*, (14.1) kenaikan harga BBM ... untuk menyempurnakan liberalisasi....
29. *Maka* (15.1.1) sungguh ironis, penghapusan subsidi atau kenaikan harga BBM ini meski merugikan *dan* (15.1.2) menyengsarakan rakyat banyak tetap dilakukan.

Kata hubung data (6.1.1), (4.6), (5.1.1), (12.1) merupakan kata hubung yang menyatakan sebab akibat. Dalam hal ini melalui kata hubung tersebut Pemerintah RI dengan kebijakannya tersebut telah membuat rakyat kesusahan. Itu berarti pemerintah dibentuk secara negatif. Selanjutnya, data nomor (5.1.1) dan (15.1.2) merupakan kata hubung yang menyatakan tambahan atau aditif. Hal yang ditambahkan lewat kata hubung tersebut adalah dampak negatif dari kenaikan harga BBM. Di sini lewat kata hubung aditif tersebut citra pemerintah semakin negatif. Kemudian, pada data nomor (28) dan (29) terdapat kata hubung antarkalimat dan antarparagraf yang menghubungkan kenaikan harga BBM dengan dampak negatif yang akan timbul. Hal tersebut adalah penilaian dan perhitungan dari HTI dan beberapa sumber yang dikutip HTI yang menilai bahwa dengan kenaikan harga BBM, nasib rakyat akan sengsara. Jadi, HTI lewat penggunaan kata hubung di atas merepresentasikan Pemerintah RI sebagai pihak yang akan menyengsarakan rakyat karena kebijakannya yang akan menaikkan harga BBM.

2) Kata Ganti Peristiwa

Sebagai pendukung kekoherensian sebuah wacana, dalam teks MHBMAK ini pun ditemukan beberapa kata ganti. Kata ganti tersebut adalah kata ganti yang merujuk pada suatu peristiwa. Peristiwa dimaksud adalah dampak yang timbul dari kenaikan harga BBM, seperti program BLSM yang dinilai tidak solutif, perhitungan kenaikan harga kebutuhan pokok sebagai akibat kenaikan harga BBM, dan penurunan daya beli masyarakat.

30. Jika misalnya, tarif angkot yang berlaku rata-rata 2 ribu, maka akan naik minimal 500 rupiah atau bahkan seribu. *Itu artinya*, (4.6.2) bantuan BLSM akan langsung habis....
31. *Di sisi lain*, harga-harga barang dan jasa pasti akan naik. Menurut hitungan Kemdag, harga-harga kebutuhan pokok akan naik 5%-10% atau rata-rata sekitar 8,2%. Namun *faktanya*, (5.3) sangat mungkin jauh....
32. Ada kenaikan angka kemiskinan sebesar 1,6 persen atas dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Jumlah orang miskin setelah kenaikan harga BBM akan menjadi 30,250 juta orang. *Sebelumnya*, (7.4) tanpa kenaikan harga BBM tahun 2013...hanya 26,250 juta.
33. Mereka yang menerima BLSM, *nyatanya* (10.1) akan tetap tergerus daya beli mereka.
34. Semua itu disebabkan *diadopsinya* (15.3) kapitalisme khususnya dalam pengelolaan migas.

Kata ganti yang ditemukan dari wacana MHBMAK adalah kata ganti *-nya* sebagai kata ganti hal atau peristiwa. Hal atau peristiwa yang dimaksud pada data (4.6.2) mengacu pada program BLSM yang tidak efektif. Kata ganti *-nya* pada data (5.3) mengacu pada fakta yang diperkirakan akan terjadi, di sini kata ganti *-nya* tersebut bersifat eksofora karena berada di luar bahasa teks, yaitu fakta yang pernah terjadi dan yang akan terjadi yang berkaitan dengan kenaikan harga BBM. *Boleh jadi*, kata ganti *-nya* pada data (5.3) tersebut merepresentasikan skemata

tentang dampak kenaikan harga BBM. Kemudian, dalam data (7.4) kata ganti *-nya* adalah eksofora yang mengacu pada hubungan angka kemiskinan dan kenaikan harga BBM. Sementara itu, data (10.1) dan (15.3) adalah kata ganti yang berbentuk katafora. Data (10.1) mengacu pada daya beli masyarakat yang akan menurun akibat kenaikan harga BBM, sedangkan data (15.3) mengacu pada sistem kapitalisme pengelolaan migas yang dinilai HTI sebagai sistem yang menyengsarakan rakyat. Jadi, melalui penggunaan beberapa kata hubung tersebut kebijakan kenaikan harga BBM selalu dikaitkan dengan banyak hal negatif seperti penjelasan di atas. Itu artinya Pemerintah RI dibentuk dalam citra yang negatif.

3.2 Dimensi Praktik Wacana

Analisis teks di atas dilanjutkan pada analisis praktik wacana. Menurut Fairclough (dalam Jorgensen dan Philips, 2007:149), analisis praktik kewacanaan ini dipusatkan pada bagaimana teks diproduksi dan dikonsumsi, termasuk di dalamnya menyelidik proses apakah yang dilalui suatu teks sebelum dicetak dan perubahan apa yang dialaminya sebelum disebarluaskan.

A. Proses Pemroduksian Wacana

Analisis terhadap proses pemroduksian atau pengodean wacana bertujuan untuk menyelidik proses apa yang terjadi dalam pemroduksian dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Wacana yang berjudul “Menaikkan Harga BBM: Menaikkan Angka Kemiskinan” adalah wacana yang dimuat di buletin *Al-Islam* Edisi 662, 21 Juni 2013 M-12 Sya’ban 1434 H. Buletin *Al-Islam* ini dikelola oleh organisasi Hizbut Tahrir Indonesia. Wacana yang berbentuk buletin lazimnya memiliki dewan redaksi dan kontributor-kontributor berita. HTI sebagai organisasi Islam yang memiliki basis yang cukup besar memiliki koordinator penyunting buletin. Seperti yang tertera di buletin tersebut, Abu Fuad adalah koordinator penyunting buletin *Al-Islam*. Dalam hal ini kemungkinan besar yang terjadi dalam proses pemroduksian adalah setiap

berita yang terkumpul di meja redaksi *Al-Islam* diedit oleh anggota redaksi *Al-Islam*-HTI termasuk dalam pemunculan teks MHBMAK. Dalam teks “Menaikkan Harga BBM: Menaikkan Angka Kemiskinan” ditemukan adanya beberapa kutipan berita dari media lain, yakni *kompas.com*. Kutipan merupakan bentuk dari interteks. Sebagaimana yang dikemukakan Kriteva (dalam Titscher *et al.*, 2009:235–238) bahwa setiap teks merupakan bagian dari serangkaian rujukan dan modifikasi dari teks lain. Kutipan pertama yang dikutip *Al-Islam* dalam buletin Edisi 662, 21 Juni 2013 M-12 Sya’ban 1434 H terletak di paragraf pertama: *APBN Perubahan 2013 telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan disahkannya APBN-P 2013 ini maka harga BBM subsidi dipastikan segera naik. Harga premium menjadi Rp6.500/liter dan solar menjadi Rp5.500/liter. Namun pastinya tergantung pada keputusan presiden SBY. Wapres Boediono saat jumpa pers di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (18/6/2013) menyatakan, “Presiden akan memutuskan kapan, menunggu persiapan dari program-program (kompensasi)” (lihat, *kompas.com* 18/6) . Kutipan yang diambil *Al-Islam*-HTI tersebut merupakan kutipan yang sejalan dan bahkan mendukung ideologi HTI dalam wacana kenaikan BBM 2013 ini. Kutipan di atas digunakan *Al-Islam* sebagai pembuka teks dalam buletin tersebut. Bisa diperkirakan alasan kutipan di atas ditempatkan di bagian pembuka karena kutipan tersebut adalah informasi pokok yang berkaitan dengan rencana kenaikan harga BBM. Berita di atas merupakan landasan dasar bagi pemerintah dalam kebijakannya untuk menaikkan harga BBM. Oleh karena itu, seperti yang telah dianalisis dalam dimensi teks di atas *Al-Islam* melakukan kritik terhadap kebijakan tersebut. Selain itu, kutipan dari *kompas.com* yang digunakan *Al-Islam* tersebut dipakai untuk memvalidasi bahwa rencana kenaikan harga BBM sudah benar-benar akan terjadi dan untuk itu *Al-Islam* melancarkan kritik dan pandangannya terhadap kebijakan tersebut. Kemudian, kutipan kedua yang digunakan *Al-Islam* adalah Menurut*

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), kemiskinan pada tahun ini akan naik dari 10,5 persen menjadi 12,1 persen. Ada kenaikan angka kemiskinan sebesar 1,6 persen atas dampak kenaikan harga BBM akan menjadi 30,250 juta orang. Sebelumnya, tanpa kenaikan harga BBM, tahun 2013 diprediksi angka kemiskinan hanya 26,250 juta. Jadi, akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, jumlah orang miskin baru mencapai 4 juta jiwa. (Kompas.com, 27/5). Selanjutnya, *Al-Islam* juga mengutip data dari Badan Statistik Nasional berkaitan dengan pengangguran dan ketenagakerjaan. Beberapa kutipan *Al-Islam* dalam wacana “Menaikkan Harga BBM: Menaikkan Angka Kemiskinan” digunakan sebagai legitimasi atas kritik yang disampaikan. Kritik ini adalah sebuah bentuk praktik sosial (kuasa) karena di dalamnya termuat makna-makna yang berusaha membangun sebuah wacana baru atau bisa dikatakan sebagai usaha pembentukan dan penggiringan ke arah wacana baru, yaitu wacana dampak negatif yang akan timbul jika kenaikan harga BBM terjadi.

Di sini redaksi *Al-Islam* di bawah kelembagaan HTI memanfaatkan beberapa berita dari *kompas.com* untuk kepentingannya melancarkan ideologi. Wacana yang diproduksi, baik dalam bentuk buletin, surat kabar, maupun berita elektronik membawa atau mengandung ideologi tertentu. Hal itu sejalan dengan apa yang dikemukakan Bakhtin (dalam Titscher *et al.*, 2009:235–238) bahwa setiap penggunaan bahasa bersifat ideologis.

Setelah analisis intertekstualitas, dilanjutkan pada penganalisisan interdiskursivitas. Interdiskursivitas berkaitan dengan jenis wacana. Dalam penelitian ini wacana yang diteliti adalah wacana yang berbentuk buletin. Buletin *Al-Islam* ini berada di bawah kelembagaan HTI. Seperti diketahui, HTI adalah ormas Islam di Indonesia yang memiliki basis yang cukup kuat. Oleh karena itu, HTI dalam melakukan berbagai kegiatannya dilancarkan melalui berbagai sarana, seperti unjuk rasa, diskusi terbuka, dan juga pemroduksian wacana di buletin *Al-Islam*.

B. Proses Penyebaran

Wacana “Menaikkan Harga BBM: Menaikkan Angka Kemiskinan” ini disebarakan melalui buletin *Al-Islam*. Buletin *Al-Islam* terbit seminggu sekali setiap hari Jumat dan HTI sebagai penerbitnya. Seperti telah dijelaskan di atas, Abu Fuad adalah koordinator penyunting dari buletin *Al-Islam*. Dalam proses penyebarannya buletin *Al-Islam* memiliki banyak kontributor pemasaran di setiap daerah. Khusus untuk wilayah Sumedang, Jawa Barat, buletin *Al-Islam* memiliki dua belas kontributor pemasaran. Berikut adalah daftar daerah dan koordinator buletin *Al-Islam* HTI untuk wilayah Sumedang, Jawa Barat: Junaedi: Sumedang kota 085294877011; Hasyim :Cimalaka 08122191725; Aas Hasbulloh: Tomo 085221881908; Budi: Wado 081322307139; Jejen: Situraja 085624940569; Irfan: Sumedang Utara 08522232518; M.Izzudin: Tanjungsari 085220008112; Zain: Pamulihan 081320399563; Edih Abdul Hafidz: Rancakalong 085294110340; Abu Sofa: Sukasari 08882093638; Acep M. Cimanggung 081322224144; Abdurrazaq Jatinangor 083821381892 (sumber: Buletin *Al-Islam* Edisi 662, 21 Juni 2013 M-12 Sya’ban 1434 H).

Dari dua belas kontributor yang mewakili Kabupaten Sumedang, bisa diperkirakan bahwa wacana ini begitu tersebar hingga ke daerah-daerah di luar pusat kota. Buletin *Al-Islam* yang merupakan buletin HTI memiliki jangkauan pemasaran di seluruh Indonesia. Tidak hanya itu HTI juga dalam melancarkan praktik kegiatannya (praktik sosial) memiliki *home page* dengan alamat. <http://www.hizbut-tahrir.or.id>. Itu berarti bahwa buletin *Al-Islam* hanya salah satu bentuk sarana (media) yang dimiliki HTI.

Jadi, bisa diperkirakan bahwa buletin *Al-Islam* Edisi 662, 21 Juni 2013 M-12 Sya’ban 1434 H yang memuat wacana “Menaikkan Harga BBM: Menaikkan Angka Kemiskinan” tersebar di seluruh daerah di Indonesia melalui tangan-tangan kontributor pemasarannya. Buletin *Al-Islam* tidak hanya terjangkau di pusat kota, tetapi hampir di setiap kecamatan di luar pusat kota. Melalui masjid-masjid, masyarakat bisa membaca (mengonsumsi) buletin ini.

C. Proses Konsumsi = Hasil Perbaikan

Analisis proses konsumsi dalam tulisan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana tanggapan pembaca terhadap teks. Teknik pengambilan informasi atau tanggapan pembaca dilakukan dengan teknik *focused group discussion* (FGD). FGD merupakan suatu proses pengumpulan informasi mengenai satu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok (Irwanto, 2006:1–2). Dalam FGD ini peneliti bertindak sebagai moderator yang mengarahkan dan mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan permasalahan dalam teks “Menaikkan Harga BBM: Menaikkan Angka Kemiskinan” di buletin *Al-Islam* tersebut kepada para responden. Kelompok ini terdiri atas sepuluh orang responden dengan lima responden berjenis kelamin laki-laki dan lima responden perempuan. Hasil diskusi FGD menyatakan ada tiga hal yang prinsip dalam teks “Menaikkan Harga BBM: Menaikkan Angka Kemiskinan” di buletin *Al-Islam* tersebut. Pertama, isi teks tersebut menunjukkan ketidaksetujuan HTI terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM di tahun 2013; kedua, gaya bahasa yang digunakan HTI pada teks tersebut cenderung bersifat provokatif karena sangat menyudutkan pemerintah; ketiga, pembaca digiring untuk menolak kebijakan pemerintah dan mengikuti sistem khilafah dalam mengelola minyak dan gas (BBM) yang semuanya itu bersifat propaganda.

3.3 Dimensi Praktik Sosial-Budaya (Makro)

Sebagaimana yang dikemukakan Fairclough (1992) bahwa dalam dimensi praktik sosial-budaya ini titik fokusnya adalah menyelidik atau memetakan bagaimana hubungan kultural, sosial, dan nonwacana serta struktur yang lebih luas yang melatarbelakangi praktik kewacanaan (dalam Jorgensen dan Philips, 2007:157–168). Jadi, berkaitan dengan penelitian ini, perlu diselidik latar belakang apa yang melandasi *Al-Islam* HTI dalam memproduksi dan menyebarkan teks MHBMAK. Untuk menjawab hal itu, peneliti mulai dengan menyelidik sejarah berdirinya HTI.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam situs HTI (<http://hizbut-tahrir.or.id>), Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds (Baitul Maqdis), Palestina. Gerakan yang menitikberatkan pada perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali khilafah Islamiyah ini dipelopori oleh Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang ulama alumni Al-Azhar Mesir, dan pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah di Palestina. HTI merupakan bagian dari Hizbut Tahrir tersebut.

Hizbut Tahrir adalah organisasi yang berideologi Islam yang mengambil sebuah ayat Alquran sebagai landasan pokoknya, yaitu (*Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat (jamaah) yang menyeru kepada kebaikan (mengajak memilih kebaikan, yaitu memeluk Islam), memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung* (QS Ali Imran: 104). Hizbut Tahrir bermaksud membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang amat parah, membebaskan umat dari ide-ide, sistem perundang-undangan, dan hukum-hukum kufur, serta membebaskan mereka dari cengkeraman dominasi dan pengaruh negara-negara kafir. Hizbut Tahrir bermaksud juga membangun kembali daulah khilafah Islamiyah di muka bumi sehingga hukum yang diturunkan Allah Swt. dapat diberlakukan kembali.

Hizbut Tahrir kini telah berkembang ke seluruh negara Arab di Timur Tengah, termasuk di Afrika, seperti Mesir, Libya, Sudan, dan Aljazair juga berkembang ke Turki, Inggris, Perancis, Jerman, Austria, Belanda, dan negara-negara Eropah lainnya hingga ke Amerika Serikat, Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Pakistan, Malaysia, Indonesia, dan Australia. Sementara itu, Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an dengan merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Pada era 1990-an ide-ide dakwah Hizbut Tahrir merambah ke masyarakat melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, dan perumahan.

Dari paparan di atas bisa disimpulkan bahwa Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik yang berideologi Islam yang bertujuan untuk menyeru

kepada semua umat Islam agar terbebas dari semua ide-ide dan aturan-aturan yang bukan dari Allah Swt. (Islam). Sebagai organisasi politik Islam, perjuangan politik Hizbut Tahrir juga tergambar dalam bukunya yang berjudul *Struktur Negara Khilafah: Pemerintah dan Administrasi*. Buku itu berisikan sistem syariah atau ideologi Islam mengenai sistem pemerintahan dan administrasi dalam mengelola sebuah negara, termasuk di dalamnya aturan pengelolaan minyak dan gas.

Berkaitan dengan hal itu, Robin Bush (1999) mengatakan bahwa modernitas (dalam hal ini sistem liberalisasi migas) adalah sistem yang memisahkan antara agama dan politik (dalam Abbuddin, 2002:30–31). Oleh karena itu, HTI sebagai ormas Islam merasa perlu terlibat dalam wacana kenaikan harga BBM ini. HTI melancarkan ideologinya tersebut melalui pemroduksian dan penyebaran teks MHBMAK di buletin *Al-Islam* sebagai wadah dan alat penyaluran ideologi Islam atau hukum syariah kepada masyarakat.

4. Penutup

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis mikro, meso, dan makro, bisa disimpulkan beberapa hal berikut.

1. HTI melalui teks MHBMAK di buletin *Al-Islam* telah merepresentasikan Pemerintah Republik Indonesia sebagai pihak yang akan membuat masyarakat semakin sulit dan sengsara karena rencana kebijakannya menaikkan harga BBM 2013. Perepresentasian tersebut disusun melalui pemanfaatan fitur-fitur linguistik, seperti

struktur teks, ketransitifan, kata hubung, kata ganti, dan modalitas. Selain itu, kebijakan tersebut disinyalir sebagai kebijakan yang proasing. Dengan demikian, HTI dalam hal ini telah membangun citra Pemerintah Republik Indonesia dengan citra yang negatif.

2. HTI sebagai pemroduksi dan penerbit teks MHBMAK di buletin *Al-Islam* telah memanfaatkan fitur modalitas dan ketransitifan sebagai alat untuk melancarkan praktik sosialnya. Praktik sosial tersebut adalah pelancaran dan penyebaran ideologi Islam atau sistem syariah sebagai sistem yang solutif dalam mengelola minyak dan gas kepada masyarakat. Pelancaran ideologi Islam yang dilakukan HTI tersebut tidak terlepas dari konteks sosial-budaya yang melingkupinya, yaitu HTI sebagai organisasi masyarakat sekaligus organisasi politik Islam yang memperjuangkan ideologi Islam atau hukum syariah untuk dijadikan sistem sosial-politik di Indonesia.

4.2 Saran

Penelitian ini hanya mengkaji satu teks wacana dalam buletin *Al-Islam* yang berkaitan dengan wacana kenaikan harga BBM 2013. Perlu pengkajian lebih lanjut dari penelitian ini dengan memanfaatkan teks buletin yang lebih banyak dan studi pustaka yang lebih lengkap sehingga akan didapat temuan-temuan baru mengenai pemanfaatan bahasa dalam pelancaran ideologi HTI di buletin *Al-Islam*.

Daftar Pustaka

- Abbuddin, Nata. 2002. *Problematika Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Al Chaidar.1999. *Wacana Ideologi Negara Islam: Studi Harakah Darul Islam dan Moro National Liberation Front*. Jakarta: Darul Falah.
- Ali, Abdullah. 2007. *Agama dalam Ilmu Perbandingan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Darmayanti, Nani *et al.* 2011. “Pidato Politik Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Calon Presiden Republik Indonesia 2009-2014: Analisis Wacana”. Dalam *Metalingua Jurnal Penelitian Bahasa*. Vol. 9, No. 1, hlm: 73--88.

- Djajasudarma, T. Fatimah. 2006. *Metode Linguistik: Ancangan Metode Penelitian dan Kajian*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Djajasudarma, T. Fatimah. 2006. *Wacana: Pemahaman dan Hubungan Antarunsur*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Eriyanto. 2009. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Fairclough, Norman. 1992. *Discourse and Social Change*. Cambridge: Polity Press.
- Fairclough, Norman. 1995. *Media Discourse*. London: Edward Arnold.
- Fairclough, Norman. 2003. *Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research*. London and New York: Routledge.
- Hizbut Tahrir. 2006. *Struktur Negara Khilafah: Pemerintahan dan Administrasi*. Terjemahan Yahya A.R. Jakarta: HTI Press.
- Irwanto. 2006. *Focused Group Discussion*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jorgensen, Marianne W. dan Louuise J. Philips. 2007. *Analisis Wacana Teori dan Metode*. Terjemahan Imam Suyitno et al. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2010. *Sastra dan Cultural Studies: Representasi Fiksi dan Fakta*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarto. 1997. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Titscher, Stefan et al. 2009. *Metode Analisis Teks dan Wacana* Terjemahan Ghazali et al.. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rujukan Lain

<http://hizbut-tahrir.or.id/tentang-kami/> (diakses 12 Desember 2013)

“Menaikkan Harga BBM: Menaikkan Angka Kemiskinan” dalam buletin *Al-Islam* Edisi 662, 21 Juni 2013 M-12 Sya’ban 1434 H.

Lampiran Data

Transkripsi buletin *Al-Islam* Edisi 662, 21 Juni 2013 M, 12 Sya'ban 1434 H.

MENAIKKAN HARGA BBM: MENAIKKAN ANGKA KEMISKINAN

APBN Perubahan 2013 telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan disahkannya APBN-P 2013 ini maka harga BBM subsidi dipastikan segera naik. Harga premium menjadi Rp 6.500/liter dan solar menjadi Rp 5.500/liter. Namun pastinya tergantung pada keputusan presiden SBY. Wapres Boediono saat jumpa pers di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (18/6/2013) menyatakan, “Presiden akan memutuskan kapan, menunggu persiapan dari program-program (kompensasi)” (lihat, *kompas.com*, 18/6).

Rakyat Miskin Aman dari Dampak Kenaikan Harga BBM?

Pemerintah menjamin rakyat miskin terlindungi dari dampak kenaikan harga BBM. Pemerintah telah menyiapkan program perlindungan dalam bentuk program kompensasi yang dianggarkan Rp 27,9 triliun. Yaitu, Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dianggarkan Rp 9,3 triliun, diberikan sebesar Rp 150 ribu perbulan kepada 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS) selama empat bulan. Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dianggarkan Rp 7,5 triliun untuk 16,6 juta siswa. Program Raskin dianggarkan Rp 4,3 triliun bagi 15,5 juta rumah tangga miskin selama tiga bulan. Program Keluarga Harapan dianggarkan Rp 0,7 triliun untuk 2,4 juta keluarga sangat miskin. Dan program infrastruktur dasar dianggarkan Rp 6 triliun terutama untuk pembangunan infrastruktur pedesaan.

Benarkah rakyat miskin akan aman dari dampak kenaikan harga BBM? Jawabannya jelas tidak. Hitungannya sederhana. BLSM Rp 150 ribu per RTS, jika tiap RTS beranggotakan 4 orang, artinya tiap orang hanya mendapat Rp 37.500 per orang per bulan atau hanya Rp 1.250 per hari. Jumlah itu akan langsung habis untuk menutupi kenaikan ongkos transportasi, bahkan bisa kurang.

Dirjen Perhubungan Darat Alimoeso mengatakan, “Kenaikan harga BBM sudah pasti *berdampak* (4.1) terhadap kenaikan tarifnya itu tidak boleh lebih dari 10-20 persen”. (*kompas.com*, 18/6). Namun pembatasan kenaikan 10-20 % itu dinilai tidak logis. Menurut Ketua Organisasi Angkutan Darat, Organda DKI, Soedirman, dengan harga BBM naik 33 %, kenaikan tarif angkutan yang masuk akal adalah 35 % (*republika.co.id*, 17/6). *Jika misalnya*, (4.6.1)-(nya 4.6.2) tarif angkot yang berlaku rata-rata 2 ribu, maka akan naik minimal 500 rupiah atau bahkan seribu. Itu artinya, bantuan BLSM akan langsung habis untuk menutupi kenaikan ongkos naik angkot pergi pulang satu kali. Jika harus dua kali naik angkot, *maka* (4.7) harus nombok.

Di sisi lain, (5.1.1) harga-harga barang dan (5.1.2) jasa pasti akan naik. Menurut hitungan Kemdag, harga-harga kebutuhan pokok akan naik 5%-10% atau rata-rata sekitar 8,2 %. Namun *faktanya* (5.3) sangat mungkin jauh lebih tinggi dari perkiraan itu. Selama ini, harga-harga sembako telah mengalami kenaikan cukup drastis dan berat bagi masyarakat. Ketika harga BBM naik, *dipastikan* (5.5) harga akan naik lagi dan tidak akan turun. Apalagi menjelang Ramadhan dan lebaran yang biasanya tanpa ada kenaikan harga BBM saja, sudah menyebabkan kenaikan harga cukup drastis. Kenaikan harga itu juga dipicu oleh naiknya ongkos transportasi dan biaya produksi. Biaya produksi mungkin akan naik secara signifikan sebagai efek akumulatif dari kenaikan ongkos transportasi dan kenaikan biaya produksi bahan baku dan bahan setengah jadi.

Jadi jelas, (6.1.1) “program perlindungan” yang disiapkan *tidak cukup* (6.1.2) melindungi rakyat miskin. Yang terjadi hanyalah mengurangi dampaknya saja. Dampak keseluruhannya *tetap saja* (6.2) akan sangat berat dirasakan. Tidak berlebihan jika BLSM itu diplesetkan dengan “balsem”.

Menaikkan Harga BBM = Menambah Jumlah Orang Miskin (7.1)

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, jumlah orang miskin pada tahun ini akan naik dari 10,5 persen menjadi 12,1 persen. Ada *kenaikan angka kemiskinan* sebesar 1,6 persen atas *dampak kenaikan* (7.2) harga BBM bersubsidi. Jumlah orang miskin setelah kenaikan BBM akan menjadi 30,250 juta orang. Sebelumnya (7.4), tanpa kenaikan harga BBM, tahun 2013 diprediksi angka kemiskinan hanya 26,250 juta. Jadi, akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, jumlah orang miskin baru mencapai 4 juta jiwa. (*kompas.com*, 27/5).

Boleh jadi, (8.1) angka kemiskinan nantinya akan lebih tinggi dari perkiraan itu. Sebab orang miskin yang ada saat ini akan tetap miskin bahkan lebih miskin lagi, dan ditambah oleh orang miskin baru.

Belajar dari fakta pada awal tahun 2006, 9 setahun setelah kenaikan harga BBM 30% jumlah *orang miskin melonjak* (9.1) menjadi 39,05 juta (17,75%). Artinya, program BLT yang digelontorkan saat itu nyatanya tidak berhasil menekan dampak kenaikan harga BBM. Padahal pada tahun 2005 ketika SBY menaikkan harga BBM dua kali, jumlah penerima BLT sebanyak 19,1 juta keluarga dan diberikan dalam jangka waktu yang lebih lama. Melihat hal itu, BLSM nanti bisa jadi akan lebih tidak berhasil mengerem pertambahan jumlah orang miskin. Sebab, jumlah RTS untuk BLSM tahun ini lebih sedikit yakni, hanya 15,5 juta RTS dan diberikan lebih singkat, hanya 4 bulan, dampak kenaikan harga BBM itu sendiri akan terus berlangsung setelah BLSM berhenti.

Mereka menerima BLSM, *nyatanya* (10.1) akan tetap tergerus daya beli mereka. Sebab BLSM sudah habis untuk menutup kenaikan ongkos angkot. Bagi mereka yang tidak menerima BLSM, penurunan daya beli mereka akan lebih besar lagi, termasuk para pekerja. Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) memperkirakan, kenaikan harga BBM akan *menyebabkan daya beli buruh akan menurun* (10.4) hingga 30 persen. Data menunjukkan tenaga kerja yang betul-betul dianggap bekerja penuh (min. 35 jam/minggu) hanya sekitar 70 %, sedangkan sisanya adalah setengah penganggur dan penganggur terbuka. Itupun, mereka yang dianggap bekerja penuh ternyata 65% bekerja di sektor informal dan hanya 35% bekerja di sektor formal (BPS, 2011). Artinya, mereka ini sangat rentan terkena dampak kenaikan harga BBM dan *merosot tingkat kesejahteraannya* (10.7). Secara umum menurut pengamat ekonomi Yanuar Rizky, dampak kenaikan harga BBM akan *menggerus daya beli 90% rakyat Indonesia*. (10.8)

Menurunnya daya beli sebagian besar rakyat itu akan berdampak besar pada dunia usaha, khususnya UMKM yang jumlahnya mencapai 99,9 % dari keseluruhan pelaku usaha di Indonesia. Dunia usaha akan terganggu dari dua sisi. Pertama, penurunan daya beli dan kedua dampak langsung dari kenaikan harga BBM. Ketua Kadin Jabar Bidang UMKM dan kemitraan, Iwan Gunawan, memperkirakan pengeluaran UMKM untuk pembelian BBM akan naik 20%. Belum lagi pengaruh kenaikan harga BBM terhadap bahan baku dan lain-lain. Padahal, sebelumnya UMKM sudah disusahkan oleh kenaikan biaya Tarif Dasar Listrik (TDL). Hal itu pada akhirnya membuat dunia usaha harus melakukan efisiensi, di antaranya bisa jadi dengan menurunkan tingkat gaji atau bahkan berupa PHK. Jika tidak, maka beban itu akan beralih kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga.

Dari semua itu, (12.1) pada akhirnya dampak kenaikan harga BBM akan menimpa semua rakyat. Yang paling merasakan *dampaknya tetap saja adalah* (12.2) rakyat kebanyakan, khususnya rakyat miskin. Lalu di mana klaim bahwa kenaikan harga BBM itu demi rakyat miskin? Jika demikian untuk siapa kenaikan harga BBM itu?

Demi Asing

Seperti sudah diketahui banyak orang, *penghapusan subsidi termasuk subsidi BBM adalah amanat (perintah) dari IMF, Bank Dunia, USAID dan ADB*. (13.1) Hal itu tertera dalam dokumen-dokumen yang ada. Selain itu sejak tahun 2008, organisasi kerja sama dan Pengembangan Ekonomi (OECD) sudah “mengejar-ngejar” pemerintah Indonesia agar memastikan penghapusan subsidi BBM. Pada 1 November 2010, Sekjend OECD, Angel Gurría, menemui sejumlah pejabat Tinggi Indonesia, termasuk Wapres Boediono dan Meukeu Agus Martowardojo. *OECD meyakinkan pemerintah Indonesia* (13.5) agar segera menghapus subsidi BBM dan listrik hingga 2014. Di samping itu, forum G-20 di Pittsburg (2009) dan Gyeongju (2010), juga mendesak penghapusan subsidi BBM. Di Gyeongju, Korea Selatan, Pemerintah Indonesia menjanjikan akan melaksanakan penghapusan subsidi energi, khususnya BBM dan TDL, dimulai pada tahun 2011.

Di samping itu, (14.1) kenaikan harga BBM ini adalah untuk menyempurnakan liberalisasi migas khususnya di sektor hilir. Hal itu agar swasta asing, bisa turut bermain di bisnis eceran migas.

Maka sungguh ironis, (15.1.1) penghapusan subsidi atau kenaikan harga BBM ini meski *merugikan dan menyengsarakan rakyat* (15.1.2) banyak tetap dilakukan. Hal itu dilakukan untuk menyenangkan dan menguntungkan pihak asing. Semua itu disebabkan diadopsinya kapitalisme khususnya dalam pengelolaan migas. Maka selama kapitalisme masih diadopsinya, (15.3) kenestapaan itu akan terus berlanjut.

Wahai Kaum Muslimin

Agar migas menjadi berkah dan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat (16.1), jalan satu-satunya harus dikelola dengan sesuai syariah Islam. Dalam Islam, migas adalah milik umum. *Rasul menegaskan*; (16.3)

والماء والنار في الكل للناس شركاء في ثلاثة

Manusia adalah serikat dalam tiga hal: dalam padang rumput, air, dan api (HR Ahmad dan Abu Dawud)

*Sebagai milik umum, migas **harus** dikelola negara mewakili rakyat.(17.1) Migas **tidak boleh** dikonsesikan atau diserahkan kepada swasta apalagi asing (17.2). Seluruh hasil pengelolaannya dikembalikan kepada rakyat.*

*Semua itu **hanya bisa** (18.1.1) sempurna **dilaksanakan** melalui **penerapan syariah Islam** (18.1.2) secara totalitas di bawah sistem khilafah Islamiyah yang mengikuti manhaj kenabian. Jika tidak, kehidupan sempit akan terus mendera. Allah Swt. *telah memperingatkan*:(18.3)*

Siapa saja yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit (TQS Thaha [20]:124)

Wallahu a'lam bi ash-shabwab. []

*keterangan: 14.1 = paragraf empat belas kalimat kesatu
 15.1.1 = paragraf lima belas kalimat kesatu bagian satu
 15.1.2 = paragraf lima belas kalimat kesatu bagian dua